

LAPORAN INDIVIDU

VISITASI KEPEMIMPINAN NASIONAL

KEPEMIMPINAN ADAPTIF DALAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH, PELAYANAN PUBLIK, DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KOLABORASI

(Adaptasi Praktik Baik Pengembangan Wilayah dan
Infrastruktur Terintegrasi di Kabupaten Lampung Selatan)



NAMA : Dr. H. OKTAVIANO, ST., M.Si



NDH : 18



INSTANSI : Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang
dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas



Dosen Pengampu

Dr. H. Farhat Syukri, SE, M.Si



KOLABORASI



INFRASTRUKTUR



PELAYANAN
PUBLIK



PARIWISATA



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN V TAHUN 2026

IDENTITAS PESERTA

Nama Peserta	: Dr. H. OKTAVIANO, ST., M.Si
Nomor Induk Pegawai	: 1673080912740001
Jabatan Saat Ini	: Kepala Dinas
Unit Kerja	: Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas
Nomor WA	: 0895 3794 33355
Nama Pengampu	: Dr. H. Farhat Syukri, SE, M.Si
Nama Pelatihan	: PKN Tingkat II Angkatan V Tahun 2026
Nama Agenda Pelatihan	: Aktualisasi Kepemimpinan Strategis
Lokus Visitasi	: Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
Penyelenggara	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan

TEMA

**Kepemimpinan Adaptif Dalam Mewujudkan Daya Saing Global Sebagai Upaya
Menciptakan Ketahanan Daerah Menuju Sumsel Maju Terus Untuk Semua**

SUB TEMA

**Kepemimpinan yang Adaptif untuk Tata Kelola Destinasi Berkelanjutan dan Nilai
Tambah Ekonomi Nasional**

KEPEMIMPINAN ADAPTIF DALAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH, PELAYANAN PUBLIK, DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KOLABORASI

(Adaptasi Praktik Baik Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Terintegrasi di Kabupaten Lampung Selatan)

A. LATAR BELAKANG

Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II untuk memperkuat kemampuan diagnosis organisasi, pembelajaran praktik baik, dan adaptasi inovasi ke dalam konteks tugas jabatan. Melalui visitasi, peserta tidak hanya melihat capaian daerah lokus, tetapi juga mempelajari bagaimana kepemimpinan daerah membangun arah kebijakan, menggerakkan perangkat daerah, memperkuat kolaborasi, dan mengubah tantangan pembangunan menjadi peluang peningkatan daya saing daerah.

Kabupaten Lampung Selatan menjadi lokus pembelajaran yang relevan karena menunjukkan arah pembangunan wilayah yang kuat sebagai Beranda Pulau Sumatera. Posisi Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu masuk utama dari Pulau Jawa menjadikan Lampung Selatan sebagai simpul konektivitas logistik, perdagangan, mobilitas penduduk, investasi, dan pariwisata. Kondisi tersebut menuntut kepemimpinan daerah yang adaptif dalam mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, pelayanan publik, promosi investasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan bahan paparan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan Lampung Selatan Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Agenda tersebut diperkuat melalui pembangunan infrastruktur konektivitas, pengembangan kawasan wisata terintegrasi Bakauheni-Kalianda-Rajabasa, penguatan Mal Pelayanan Publik, city branding South Lampung Spirit of Krakatoa, peningkatan investasi, dan inovasi layanan publik digital. Praktik baik ini memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan fisik harus dikaitkan dengan data, tata ruang, pelayanan dasar, ekonomi lokal, dan partisipasi masyarakat.

Sebagai Kepala Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas, hasil visitasi ini memiliki relevansi langsung terhadap tugas penyelenggaraan infrastruktur bidang keciptakaryaan, penataan ruang, jalan lingkungan, drainase, irigasi, pengelolaan sumber

daya air, dan penguatan layanan publik bidang pekerjaan umum. Pembelajaran dari Lampung Selatan dapat diadaptasi untuk memperkuat perencanaan infrastruktur berbasis data, integrasi lintas sektor, percepatan pelayanan masyarakat, serta penguatan daya saing wilayah Kabupaten Musi Rawas.

B. PROFIL SINGKAT LOKUS

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten strategis di Provinsi Lampung dengan luas wilayah 2.227,379 km². Secara administratif, Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas 17 kecamatan, 256 desa, dan 4 kelurahan. Jumlah penduduknya tercatat 1.124.683 jiwa dengan kepadatan 571 jiwa/km². Kabupaten ini juga memiliki panjang garis pantai sekitar 247,76 km yang menjadi modal penting bagi pengembangan wisata bahari, ekonomi pesisir, perikanan, perdagangan, dan konektivitas antarwilayah.

Kinerja makro Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2025, PDRB ADHB mencapai sekitar Rp65,65 triliun dan PDRB per kapita sekitar Rp57,95 juta. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat 5,71%, meningkat dari 4,62% pada tahun 2024, serta menjadi salah satu pertumbuhan tertinggi di Provinsi Lampung. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 mencapai 73,10 atau naik 0,95 poin dari tahun sebelumnya. Realisasi investasi tahun 2025 sebesar Rp3,040 triliun, meningkat 12,95% dibandingkan tahun 2024.

Secara geografis dan fungsional, Lampung Selatan berperan sebagai Beranda Sumatera. Keberadaan Pelabuhan Bakauheni dan koneksi ke Pulau Jawa menjadikan daerah ini memiliki posisi sangat strategis dalam mobilitas orang dan barang. Arah pengembangan wilayah dalam dokumen Visioning Lampung Selatan diarahkan pada penguatan sumber daya manusia, ekonomi industri dan perdagangan, lingkungan hidup, kualitas layanan dasar, pariwisata dan budaya, serta tata kelola pemerintahan.

Dalam pelayanan publik, Kabupaten Lampung Selatan mengembangkan Mal Pelayanan Publik dengan 237 layanan perizinan, 19 perangkat daerah, serta 12 instansi vertikal/BUMN/BUMD. Penguatan pelayanan juga didukung inovasi digital seperti aplikasi Halo Lamsel untuk meningkatkan akses pengaduan dan layanan masyarakat. Pada sektor pariwisata, Lampung Selatan memiliki 92 objek wisata, terdiri dari 25 wisata alam, 47 wisata bahari, 7 wisata budaya/sejarah, dan 13 wisata terpadu, dengan dukungan 23 hotel dan 12 homestay.

C. IDENTIFIKASI

Hasil visitasi menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki komitmen kuat dalam membangun daerah melalui integrasi kebijakan infrastruktur, pengembangan kawasan, pelayanan publik, dan promosi pariwisata. Namun, sebagaimana daerah berkembang lainnya, Lampung Selatan juga menghadapi beberapa isu strategis yang menjadi bahan pembelajaran bagi peserta VKN.

1. Belum optimalnya integrasi kawasan wisata, khususnya pada koridor Bakauheni, Kalianda, Rajabasa, dan kompleks wisata pantai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya lama tinggal wisatawan, bahkan dalam paparan disebutkan length of stay hanya sekitar 2 jam sehingga willingness to pay terhadap sektor pariwisata daerah masih rendah.
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih relatif kecil, yaitu di bawah 2%, meskipun jumlah kunjungan wisatawan tahun 2024 mencapai 1.560.003 orang dan tahun 2025 meningkat menjadi 1.647.716 orang. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan belum sepenuhnya berubah menjadi nilai ekonomi daerah yang optimal.
3. Infrastruktur masih menjadi isu strategis, terutama terkait konektivitas, pemerataan layanan dasar, dukungan ekonomi, dan pariwisata. Paparan lokus menyebutkan adanya kerusakan jalan, kemacetan, dan minimnya transportasi umum yang menghambat logistik serta investasi.
4. Penyelenggaraan jalan kabupaten menghadapi tantangan beban lalu lintas dan kendaraan ODOL (over dimension over load) karena Lampung Selatan merupakan lintasan logistik Sumatera-Jawa. Tantangan ini menyebabkan beban jalan melampaui daya dukung perkerasan dan mempercepat kerusakan jalan.
5. Kualitas pelayanan publik perlu terus diperkuat melalui integrasi layanan, digitalisasi, penyederhanaan proses, penguatan kompetensi ASN, dan budaya kerja yang responsif. Keberadaan MPP dan aplikasi Halo Lamsel menunjukkan arah transformasi, tetapi efektivitasnya memerlukan konsistensi data, SOP lintas perangkat daerah, dan monitoring berkelanjutan.
6. Ketergantungan fiskal terhadap pendapatan transfer masih cukup tinggi. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp2,367 triliun didominasi pendapatan transfer

sekitar 80,55%, sedangkan PAD sekitar 19,45%. Kondisi ini menuntut penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, termasuk melalui investasi, pariwisata, dan peningkatan kualitas layanan.

7. Pengelolaan persampahan menjadi tantangan pelayanan dasar. Mulai tahun 2025, kinerja pengelolaan sampah dinilai melalui Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), dan nilai IKPS Kabupaten Lampung Selatan sebesar 20,2 masih berada pada kategori rendah. Tantangan ini relevan dengan peran infrastruktur dasar, sanitasi, TPA/TPST, dan partisipasi masyarakat.

D. POTENSI DAERAH

Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi daerah yang besar untuk dikembangkan melalui kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor. Potensi pertama adalah posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera. Pelabuhan Bakauheni menjadi simpul konektivitas utama yang menghubungkan arus logistik, perdagangan, dan mobilitas masyarakat antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Posisi ini memberikan peluang besar bagi pengembangan kawasan ekonomi, kawasan pariwisata, dan layanan pendukung mobilitas.

Potensi kedua adalah sumber daya pariwisata dan kebudayaan. Lampung Selatan memiliki garis pantai panjang, destinasi bahari, kawasan Gunung Krakatau, budaya lokal, dan potensi event daerah. Pengembangan city branding dengan elemen Gunung Krakatau, Siger, dan Ombak menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya membangun identitas visual dan narasi pembangunan berbasis alam, bahari, dan budaya.

Potensi ketiga adalah infrastruktur dan investasi. Pada tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp3,040 triliun dengan kontribusi PMDN sebesar 87,3% dan PMA sebesar 12,7%. Sektor investasi yang menonjol antara lain listrik, gas dan air, industri makanan, perdagangan dan reparasi, serta beberapa sektor industri dan kawasan. Potensi ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar dan kepastian layanan perizinan menjadi faktor penting dalam menarik investasi.

Potensi keempat adalah dukungan sosial dan kelembagaan lokal. Pengembangan pariwisata melibatkan Pokdarwis, Karang Taruna, tokoh adat, masyarakat lokal, homestay, UMKM, kuliner lokal, atraksi budaya, dan kegiatan event. Model ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah

tidak cukup hanya digerakkan oleh pemerintah, tetapi perlu membangun masyarakat sebagai co-creator pembangunan dan layanan.

Potensi kelima adalah komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat layanan publik. Keberadaan Mal Pelayanan Publik, digitalisasi layanan, dan penguatan gerakan kebersihan lingkungan seperti ABRI-BKW memberi gambaran bahwa tata kelola daerah diarahkan pada peningkatan kepuasan masyarakat, citra daerah, dan kemudahan berusaha. Potensi ini dapat menjadi pembelajaran bagi Kabupaten Musi Rawas dalam memperkuat layanan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat.

E. STRATEGI MARKETING

Strategi marketing daerah yang dipelajari dari Lampung Selatan tidak hanya berkaitan dengan promosi wisata, tetapi juga dengan cara pemerintah daerah membangun identitas, citra, kepercayaan, dan nilai tambah wilayah. Marketing daerah diarahkan untuk mengubah citra Lampung Selatan dari daerah transit menjadi daerah tujuan, dari kunjungan singkat menjadi pengalaman wisata yang lebih lama, dan dari potensi alam menjadi daya saing ekonomi lokal.

Strategi pertama adalah penguatan city branding South Lampung Spirit of Krakatoa. Branding tersebut memadukan elemen Gunung Krakatau, Siger, dan Ombak sebagai simbol gunung, bahari, dan budaya. Pendekatan ini penting karena promosi daerah tidak cukup dengan menyebut potensi, tetapi perlu menghadirkan narasi yang kuat, mudah diingat, dan konsisten digunakan dalam pelayanan, event, promosi investasi, serta pengembangan kawasan.

Strategi kedua adalah pengembangan kawasan wisata terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengarahkan pembangunan kawasan wisata Bakauheni, Kalianda, dan Rajabasa sebagai destinasi unggulan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Strategi ini menjawab masalah kawasan wisata yang belum terintegrasi serta rendahnya lama tinggal wisatawan. Dengan integrasi destinasi, akses, event, UMKM, dan akomodasi, nilai ekonomi pariwisata dapat meningkat.

Strategi ketiga adalah penguatan event dan aktivasi ruang publik. Lampung Selatan Festival 2025 menjadi contoh kegiatan yang mampu meningkatkan kunjungan wisata dan aktivitas ekonomi lokal. Festival, atraksi budaya, pameran UMKM, expo produk lokal, dan kegiatan

olahraga/ekonomi kreatif merupakan instrumen marketing daerah yang dapat memperkuat promosi sekaligus menggerakkan masyarakat.

Strategi keempat adalah kemudahan layanan dan promosi investasi. MPP, layanan perizinan, integrasi OPD, serta penyediaan informasi investasi menjadi bagian dari marketing pelayanan publik. Investor dan masyarakat akan lebih percaya apabila pemerintah daerah mampu menyediakan proses layanan yang mudah, transparan, cepat, dan berbasis data. Dalam konteks Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas, strategi ini dapat diadaptasi melalui penyediaan data infrastruktur, tata ruang, kesesuaian lahan, jaringan jalan, drainase, irigasi, dan utilitas secara lebih informatif serta mudah diakses.

F. DIAGNOSA

Berdasarkan hasil pembelajaran dari lokus Lampung Selatan, dapat dirumuskan beberapa diagnosa utama yang relevan bagi kepemimpinan adaptif di bidang pekerjaan umum, cipta karya, tata ruang, dan pengairan.

1. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin menghubungkan visi besar daerah dengan program teknis yang konkret. Lampung Selatan menjadikan posisi sebagai Beranda Sumatera sebagai dasar pembangunan konektivitas, pariwisata, investasi, dan pelayanan publik.
2. Pembangunan infrastruktur tidak dapat berdiri sendiri. Jalan, jembatan, akses wisata, sanitasi, persampahan, ruang publik, tata ruang, dan pelayanan perizinan harus dirancang sebagai satu sistem yang saling mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
3. Kinerja jalan yang meningkat tetap membutuhkan strategi pemeliharaan yang kuat. Lampung Selatan memiliki panjang jalan kabupaten sekitar 1.204 km dan 237 ruas, dengan kondisi mantap 63,07% pada tahun 2025. Tantangan ODOL dan fungsi jalan yang melampaui kelas teknis menunjukkan pentingnya pengendalian beban, pengawasan, dan perencanaan berbasis kondisi aktual lapangan.
4. Transformasi pelayanan publik memerlukan data terpadu. MPP dan Halo Lamsel memberi contoh bahwa layanan masyarakat perlu dibangun dalam sistem yang mudah diakses.

Namun, keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada integrasi data, kejelasan kewenangan, standar pelayanan, serta respons cepat perangkat daerah.

5. Pengembangan pariwisata dan investasi membutuhkan dukungan tata ruang yang jelas, infrastruktur dasar yang memadai, dan promosi berbasis kawasan. Tanpa integrasi akses, amenitas, atraksi, dan kelembagaan lokal, kunjungan wisata tidak otomatis menghasilkan kontribusi ekonomi yang besar.
6. Keterbatasan fiskal daerah menuntut inovasi pembiayaan, prioritas kegiatan, kolaborasi dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat. Dinas teknis perlu menyiapkan data kebutuhan dan prioritas yang kuat agar program dapat memperoleh dukungan lintas sumber pendanaan.
7. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas lingkungan, kebersihan, drainase, sanitasi, dan fasilitas umum. Gerakan ABRI-BKW di Lampung Selatan memperlihatkan pentingnya kampanye, keteladanan, dan kolaborasi komunitas dalam memastikan infrastruktur yang dibangun dapat dijaga bersama.

G. LESSON LEARNED

Pelaksanaan Visitasi Kepemimpinan Nasional di Kabupaten Lampung Selatan memberikan pembelajaran penting terkait kepemimpinan adaptif, penguatan infrastruktur wilayah, pelayanan publik, pengembangan pariwisata, dan tata kelola pembangunan yang relevan dengan tugas Kepala Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas. Beberapa lesson learned yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan adaptif harus mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah menjadi agenda teknis yang terukur. Lampung Selatan menempatkan diri sebagai Beranda Sumatera, sehingga program infrastruktur, pariwisata, investasi, pelayanan publik, dan branding daerah diarahkan untuk mendukung posisi strategis tersebut. Pembelajaran bagi Kabupaten Musi Rawas adalah perlunya memperkuat narasi pembangunan infrastruktur yang terhubung dengan visi daerah, produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar masyarakat.
2. Pengambilan keputusan bidang infrastruktur harus berbasis data spasial dan data kinerja. Data kondisi jalan, jembatan, drainase, irigasi, kawasan permukiman, sanitasi, dan tata ruang perlu disajikan dalam dashboard yang dapat digunakan untuk menyusun prioritas program.

Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas perlu memperkuat sistem informasi infrastruktur daerah agar perencanaan lebih objektif, transparan, dan mudah dimonitor.

3. Pembangunan konektivitas harus dikaitkan dengan simpul ekonomi dan pelayanan publik. Lampung Selatan menunjukkan bahwa jalan, jembatan, akses wisata, MPP, investasi, dan event daerah perlu saling mendukung. Bagi Musi Rawas, pembelajaran ini dapat diterapkan melalui penyusunan prioritas jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan pertanian, pusat permukiman, layanan publik, kawasan irigasi, serta pusat pertumbuhan ekonomi kecamatan.
4. Tata ruang menjadi instrumen pengarah pembangunan yang sangat penting. Pengembangan kawasan wisata dan investasi di Lampung Selatan memperlihatkan bahwa kepastian ruang menentukan efektivitas pembangunan. Kabupaten Musi Rawas perlu memperkuat pemanfaatan data RTRW/RDTR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan infrastruktur lebih tertib dan berkelanjutan.
5. Pelayanan publik bidang pekerjaan umum perlu bergerak menuju layanan digital dan responsif. Praktik MPP dan Halo Lamsel dapat menginspirasi penguatan layanan aduan jalan rusak, drainase, sanitasi, air bersih, tata ruang, dan irigasi di Kabupaten Musi Rawas. Sistem pengaduan dan monitoring perlu dikaitkan dengan tindak lanjut teknis, status penyelesaian, dan evaluasi kepuasan masyarakat.
6. Pemeliharaan infrastruktur harus menjadi bagian dari strategi keberlanjutan. Tantangan ODOL di Lampung Selatan memberi pelajaran bahwa pembangunan jalan tidak cukup dengan membangun atau memperbaiki, tetapi harus disertai pengendalian penggunaan jalan, pengawasan beban lalu lintas, perencanaan kelas jalan, dan alokasi pemeliharaan rutin/berkala yang memadai.
7. Kolaborasi menjadi kunci pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Lampung Selatan melibatkan masyarakat, Pokdarwis, Karang Taruna, UMKM, tokoh lokal, dan perangkat daerah dalam pengembangan wisata dan kebersihan lingkungan. Kabupaten Musi Rawas dapat mengadaptasi pendekatan ini melalui gotong royong pemeliharaan drainase lingkungan, kampanye kebersihan kawasan permukiman, dukungan masyarakat terhadap jaringan irigasi, dan penguatan peran kecamatan/desa dalam menjaga aset infrastruktur.
8. Branding daerah harus didukung oleh kualitas infrastruktur. South Lampung Spirit of Krakatoa menunjukkan bahwa identitas daerah perlu diperkuat dengan akses, fasilitas, layanan, event, dan kenyamanan ruang publik. Bagi Musi Rawas, penguatan citra daerah

harus didukung oleh wajah infrastruktur yang baik, kawasan permukiman yang tertata, drainase yang berfungsi, jaringan irigasi yang produktif, serta pelayanan tata ruang yang mudah.

9. Keterbatasan fiskal menuntut prioritisasi dan inovasi pembiayaan. Data Lampung Selatan menunjukkan dominasi pendapatan transfer dalam struktur pendapatan daerah. Hal ini menjadi pembelajaran bahwa Dinas PU harus mampu menyusun proposal program yang kuat, berbasis data teknis, memiliki manfaat ekonomi-sosial yang jelas, dan siap dikolaborasikan dengan APBD, APBN, bantuan provinsi, CSR, dan kemitraan swasta.
10. Monitoring dan evaluasi berbasis kinerja harus menjadi budaya kerja organisasi. Setiap program infrastruktur perlu memiliki indikator keluaran dan hasil, seperti panjang jalan tertangani, peningkatan kondisi mantap, luas kawasan permukiman tertata, penurunan titik genangan, peningkatan fungsi irigasi, percepatan layanan tata ruang, dan kepuasan masyarakat. Dengan demikian, kinerja dinas tidak hanya terlihat dari realisasi anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan lesson learned tersebut, beberapa hal yang dapat diimplementasikan di Kabupaten Musi Rawas antara lain:

1. Membangun database dan dashboard infrastruktur terpadu yang memuat jalan, jembatan, drainase, irigasi, air bersih, sanitasi, bangunan gedung, kawasan permukiman, dan tata ruang.
2. Menyusun peta prioritas infrastruktur berbasis konektivitas ekonomi, pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan wilayah, dan dukungan terhadap program strategis daerah.
3. Memperkuat integrasi perencanaan bidang cipta karya, tata ruang, dan pengairan dengan program kecamatan/desa serta agenda pembangunan daerah.
4. Mengembangkan kanal pengaduan dan monitoring tindak lanjut layanan PU yang mudah diakses masyarakat dan terhubung dengan unit teknis terkait.
5. Meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, dan irigasi melalui sistem inspeksi rutin, pelaporan cepat, dan prioritas berbasis tingkat kerusakan serta manfaat ekonomi.
6. Menguatkan koordinasi lintas OPD dalam pelayanan perizinan pemanfaatan ruang, penataan kawasan, sanitasi, persampahan, dan infrastruktur lingkungan.

7. Mendorong budaya kerja ASN yang adaptif, kolaboratif, cepat merespons masalah lapangan, dan mampu menggunakan data digital dalam pengambilan keputusan.
8. Mengembangkan gerakan kolaboratif bersama masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, fungsi drainase, jaringan irigasi, dan fasilitas umum.
9. Menyiapkan dokumen teknis dan proposal pendanaan yang kuat untuk mendukung akses pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, CSR, dan kemitraan pembangunan.
10. Menetapkan indikator kinerja berbasis outcome sehingga manfaat program infrastruktur dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

Dengan demikian, hasil Visitasi Kepemimpinan Nasional ini memberikan pemahaman bahwa kepemimpinan adaptif di bidang pekerjaan umum tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kemampuan mengintegrasikan visi daerah, data, tata ruang, pelayanan publik, kolaborasi, dan keberlanjutan. Praktik baik Kabupaten Lampung Selatan menjadi inspirasi bagi Kabupaten Musi Rawas untuk memperkuat tata kelola infrastruktur wilayah yang responsif, produktif, inklusif, dan berdaya saing.